

# **SKRIPSI**

**ANALISA KEPEMIMPINAN LURAH DALAM MENINGKATKAN  
PARTISIPASI MASYARAKAT MEMBAYAR PAJAK BUMI  
DAN BANGUNAN DI KELURAHAN KAMPUNG DAGANG  
KECAMATAN RENGAT KABUPATEN  
INDRAGIRI HULU**



**OLEH**

**WILLI HADI KURNIAWAN  
NIM. 10576002289**

**PROGRAM S1**

**JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU**

**2012**

**ANALISA KEPEMIMPINAN LURAH DALAM MENINGKATKAN  
PARTISIPASI MASYARAKAT MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN  
BANGUNAN DI KELURAHAN KAMPUNG DAGANG  
KECAMATAN RENGAT KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

**A B S T R A K**

*Kepala Kelurahan atau Kepala Desa adalah aparat pemerintah yang terendah di bawah Camat, maka pada gilirannya tanggung jawab sukses tidaknya pungutan Pajak Bumi dan Bangunan tergantung pada pundaknya. Kepala Kelurahan mempunyai tugas sebagai penyelenggara dan penanggungjawab utama di bidang Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah, urusan Pemerintah umum termasuk Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban.*

*Perumusan masalah yaitu : Bagaimanakah Kepemimpinan Lurah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Kampung Dagang Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu? Tujuan penelitian ini ingin mengetahui dan menganalisis Kepemimpinan Lurah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Kampung Dagang Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu.*

*Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil disimpulkan Motivasi Lurah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat membayar PBB di Kelurahan Kampung Dagang Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu, tidak jarang, tetapi sangat jarang karena keterbatasan waktu Lurah tersebut. Pemberian motivasi kepada masyarakat dalam meningkatkan pembayaran PBB yang dilakukan oleh Lurah, sangat jarang dilakukan. Lurah jarang mempertanggungjawabkan setiap keputusan/kebijakan yang dibuatnya, tidak selalu tetapi jarang karena Lurah kurang memperhatikan pelaksanaan tugasnya. Setiap keputusan/kebijakan yang dibuat oleh Lurah masih belum maksimal dipertanggungjawabkan hanya sebagian keputusan kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan. Lurah jarang merealisasikan setiap keputusan/kebijakan yang dibuatnya, tidak selalu tetapi jarang karena Lurah kurang kemampuannya dalam hal memimpin. Setiap keputusan/kebijakan yang dibuat oleh Lurah masih belum maksimal terealisasikan, hanya sebagian keputusan kebijakan yang telah terealisasikan. Lurah jarang aktif mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam membayar pajak, tidak selalu tetapi jarang karena Lurah kurang waktu yang tepat. Sistem komunikasi Lurah dalam memberikan informasi kepada masyarakat dalam hal pembayaran PBB sudah baik, tidak sangat baik, tetapi karena Lurah kurang pengetahuan yang tepat. Sistem komunikasi Lurah dalam memberikan informasi kepada masyarakat dalam hal pembayaran PBB sudah baik. Sistem komunikasi Lurah sebagai stabilitator (unsur penengah antara masyarakat dengan pemerintah) terlaksana dengan baik, tapi tidak sangat baik, tetapi karena Lurah kurang pengalaman sesuai bidangnya. Sistem komunikasi Lurah sebagai stabilitator (unsur penengah antara masyarakat dengan pemerintah) terlaksana dengan baik. Sistem komunikasi Lurah sebagai fasilitator (mempermudah, memperlancar kegiatan masyarakat) terlaksana dengan baik, tetapi karena Lurah kurang mampu memanfaatkan sumber daya yang ada.*

## DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iv
DAFTAR TABEL .....	vi
 BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	8
1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	8
1.4.SistematikaPenulisan .....	9
 BAB II : TELAAH PUSTAKA	
2.1. Kepemimpinan .....	11
2.2. TeoriPartisipasi .....	23
2.3. Pajak .....	27
2.4. PajakDaerah .....	30
2.5. PajakBumi dan Bangunan .....	30
2.6. KonsepOperasional .....	33
 BAB III : METODE PENELITIAN	
3.1. Lokasi dan WaktuPenelitian .....	36
3.2.Jenis dan Sumber Data .....	36
3.3.MetodePengumpulan Data .....	37
3.4.Populasi dan SampelPenelitian.....	38
3.5.Analisis Data .....	41
 BAB IV : GAMBARAN UMUM PENENELITIAN	
A. SejarahKelurahanKampungDagang .....	42
B. KeadaaanSosial .....	43
C. PotensiKelurahanKampungDagang .....	45
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	49

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN	
6.1.Kesimpulan .....	58
6.2. Saran-saran .....	60
DAFTAR PUSTAKA .....	61
LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

<i>Tabel</i>	<i>Halaman</i>
1.1 : Realisasi SPPT PBB di Kelurahan Kampung Dagang Kecamatan Rengat Keadaan 2009 s/d 2011.....	5
1.2 : Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Kampung Dagang Kecamatan Rengat, Keadaan 2009 s/d 2011 .....	6
4.1 : JumlahPendudukKelurahanKampungDagangKecamatanRengat Kabupaten Indragiri Hulu .....	43
4.2 : Tingkat PendidikanPenduduk di KelurahanKampungDagangKecamatanRengatKabupaten Indragiri Hulu .....	43
4.3 : BidangPekerjaanPenduduk di KelurahanKampungDagangKecamatanRengatKabupaten Indragiri Hulu .....	44
4.4 : Sarana dan Prasarana di KelurahanKampungDagangKecamatanRengatKabupatenIndragiriHulu .....	45
4.5 : PotensiKelurahanKampungDagangKecamatanRengatKabupaten Indragiri Hulu .....	46
5.1 : Motivasi Lurah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat membayar PBB di Kelurahan Kampung Dagang Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu .....	50
5.2 : Pertanggung jawaban oleh Lurah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat membayar PBB di Kelurahan Kampung Dagang Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu .....	51
5.3 : Realisasi keputusan yang dibuat oleh Lurah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat membayar PBB di Kelurahan Kampung Dagang Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu .....	52

5.4	:	Keaktifan Lurah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat membayar PBB di Kelurahan Kampung Dagang Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu .....	53
5.5	:	Sistem komunikasi Lurah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat membayar PBB di Kelurahan Kampung Dagang Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu .....	54
5.6	:	Sistem komunikasi Lurah sebagai stabilitator dalam meningkatkan partisipasi masyarakat membayar PBB di Kelurahan Kampung Dagang Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu .....	55
5.7	:	Sistem komunikasi Lurah sebagai fasilitator dalam meningkatkan partisipasi masyarakat membayar PBB di Kelurahan Kampung Dagang Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu .....	56

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Dalam rangka pencapaian suatu tujuan, yaitu membangun suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan dengan bertitik tolak dari kenyataan bahwa sebagian besar dari kehidupan rakyat serta perekonomiannya yang bercorak agraris, maka selanjutnya untuk mewujudkan cita-cita itu diperlukan adanya pengaturan atas bumi termasuk penggunaan perairan serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan; b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang

seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara.

Bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah; bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif; bahwa kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

Dengan dikeluarkannya Undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan ini, khususnya pajak kebendaan dan Pajak Kekayaan yang dirasakan telah mengakibatkan suatu beban “Pajak berganda” bagi masyarakat tidak akan terjadi lagi. Undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan sangat sederhana, mudah, adil, dan memberikan suatu kepastian *actor* sebagaimana yang diinginkan oleh masyarakat banyak.

Dalam pelaksanaannya berdasarkan undang-undang ini kepada “Wajib Pajak” diberikan kepercayaan penuh untuk melaksanakan kewajiban serta pemenuhan haknya dibidang perpajakan, maka diharapkan dapat mewujudkan iklim perpajakan yang baik, yang akan menunjang terciptanya peningkatan kesadaran dari masyarakat terhadap pajak sehingga dengan demikian harapan adanya peningkatan dalam penerimaan *actor* dari



actor pajak akan dapat terwujud dan pemerataan pendapatan masyarakat secara menyeluruh akan tercapai.

Berkenaan dengan pemasukan Pajak Bumi dan Bangunan yang obyeknya adalah hak milik masyarakat berupa bumi dan bangunan, Pemerintah Pusat menyerahkan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pemungutan sampai pada pengelolaannya yang diatur dalam surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1007/Kmk.04/1985 Pasal 1 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sehingga berdasarkan keputusan tersebut, kekuasaan dilimpahkan kepada :

- a. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Riau atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk Daerah Propinsi Riau
- b. Bupati/Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk, untuk Daerah lain.

Pelaksanaan tugas tersebut secara operasional dilimpahkan oleh Bupati Kepala Daerah kepada Dinas Pendapatan Daerah, Camat dan Kepala Kelurahan atau Kepala Desa yang ada di wilayahnya.

Kepala Kelurahan atau Kepala Desa adalah aparat pemerintah yang terendah di bawah Camat, maka pada gilirannya tanggung jawab sukses tidaknya pungutan Pajak Bumi dan Bangunan tergantung pada pundaknya. Hal ini sesuai bunyi pasal 2 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 1980 tentang pedoman susunan organisasi dan tata kerja Pemerintahan Kelurahan yang mengatur bahwa :

“Kepala Kelurahan mempunyai tugas sebagai penyelenggara dan penanggungjawab utama di bidang Pemerintahan, Pembangunan, dan

Kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah, urusan Pemerintah umum termasuk Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban”.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam Pasal 2 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 1980 tentang pedoman susunan organisasi dan tata kerja Pemerintahan Kelurahan, Kepala Kelurahan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Menggerakkan partisipasi masyarakat,
- b. Melaksanakan tugas dari Pemerintah atasan,
- c. Melaksanakan koordinasi terhadap jalannya Pemerintahan Kelurahan,
- d. Melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya dibidang Pembangunan dan kemasyarakatan,
- e. Melaksanakan tugas-tugas dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban.

Kepala Kelurahan dalam fungsinya sebagai pemrakarsa dan pelaksana di bidang Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan dituntut untuk menjadi panutan, pendorong, dan pemberi semangat bagi masyarakatnya, sehingga dalam diri masyarakat timbul dorongan dan semangat untuk mau bekerjasama secara sukarela demi mencapai tujuan bersama.

Upaya Kepala Kelurahan di dalam fungsinya sebagai pemrakarsa dan pelaksana di bidang Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan itu pun terjadi di Kelurahan Kampung Dagang Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu, yaitu upaya Kepala Kelurahan dalam membina hubungan

dengan masyarakat di dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembayaran PBB demi mencapai target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan studi awal yang dilakukan, masalah-masalah yang menjadi *actor* tidak tercapainya target PBB sebagaimana telah ditetapkan, adalah masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Artinya partisipasi masyarakat dalam membayar PBB belum mencapai tingkat tinggi dalam arti kata masyarakat Wajib Pajak belum sepenuhnya melibatkan diri. Hal ini ditunjukkan, masih banyaknya Wajib Pajak yang menunggak pembayaran PBB sehingga target penerimaan PBB untuk beberapa tahun belum mencapai target yang diharapkan.

Adapun data Realisasi SPPT PBB di Kelurahan Kampung Dagang Kecamatan Rengat Keadaan 2009 s/d 2011, sebagai berikut:

Tabel 1.1 : Realisasi SPPT PBB di Kelurahan Kampung Dagang Kecamatan Rengat Keadaan 2009 s/d 2011.

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase
1	2009	1.674	1.552	85,84
2	2010	1.795	1.597	87,97
3	2011	1.830	1.618	88,42

Sumber : Kantor Kelurahan Kampung Dagang, Kec. Rengat, 2012.

Data pada tabel diatas menunjukkan tingkat persentase dari realisasi Pajak Bumi dan Bangunan yang meningkat setiap tahunnya, akan tetapi jumlah realisasi setiap tahunnya belum sesuai sebagaimana yang ditargetkan. Hal ini disebabkan masih kurangnya pemahaman masyarakat akan arti pajak

bagi pembangunan, sehingga mengakibatkan partisipasi masyarakat dalam membayar PBB belum sesuai sebagaimana yang diharapkan.

Adapun data Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Kampung Dagang Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai berikut:

Tabel 1.2 : Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Kampung Dagang Kecamatan Rengat, Keadaan 2009 s/d 2011.

No	Tahun	Wajib Pajak (WP)	Penerimaan Pajak (Rp)	Persentase (%)
1	2009	1.552	83.034.645	-
2	2010	1.597	84.041.517	1,21
3	2011	1.618	85.778.293	2,07

Sumber Data : Kantor Kelurahan Kampung Dagang, Kec. Rengat, 2012

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah wajib pajak dan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Kampung Dagang Kecamatan Rengat, keadaan 2009 sampai dengan 2011 mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun peningkatannya masih belum menunjukkan tingginya tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.

Berdasarkan informasi dari para informan yang di wawancara, diketahui Kelurahan Kampung Dagang merupakan salah satu Kelurahan yang berada di Kecamatan Rengat, Provinsi Riau adalah lembaga pemerintahan yang mempunyai tugas sebagai unsur pelaksana daerah di bidang pemerintahan. Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural di lingkungan Kelurahan, Kelurahan Kampung Dagang Kecamatan Rengat, memiliki tugas pokok dalam melaksanakan fungsinya. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Kelurahan Kampung Dagang, memiliki fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program kerja kelurahan.
2. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Camat.
3. Fasilitasi tugas-tugas dinas dan lembaga teknis yang dilaksanakan di wilayah Kelurahan.
4. Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.
5. Penyelenggaraan tugas-tugas pembantuan dan tugas lain yang diberikan atasan.

Ditinjau dari sumber daya manusianya, faktor manusia sebagai tenaga pelaksana memegang peranan yang sangat penting bahkan sangat menentukan dalam pencapaian tujuan. Dalam sebuah organisasi pemerintahan, sumber daya manusia terdiri dari pemimpin dan pegawai. Kelurahan Kampung Dagang Kecamatan Rengat merupakan suatu organisasi pemerintah yang memiliki personil berjumlah 8 pegawai. Peranan seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya memiliki kedudukan sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat yang berkemampuan tinggi, penuh dedikasi dan memiliki disiplin kerja. Hal tersebut sangat penting dalam pencapaian tujuan. Untuk mewujudkan sikap kerja pegawai yang baik, diperlukan berbagai cara yang dapat dilakukan oleh seorang pemimpin suatu organisasi pemerintah, yaitu dengan menggunakan gaya kepemimpinan yang tepat.

Peranan seorang pemimpin penting untuk mencapai tujuan organisasi yang diinginkan termasuk organisasi pemerintahan Kelurahan Kampung Dagang Kecamatan Rengat, terutama berkaitan dengan peningkatan kinerja pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya. Kinerja

pegawai merupakan hasil kerja yang dapat dicapai seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi.

Berdasarkan masalah tersebut, penulis tertarik untuk meneliti mengenai Kepemimpinan Kepala Kelurahan dalam hubungannya dengan tingkat partisipasi masyarakat yang dituangkan dalam judul, **“Analisa Kepemimpinan Lurah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Kampung Dagang Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu”**.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dalam tulisan ini akan diteliti dan dibahas permasalahan mengenai : **Bagaimanakah Kepemimpinan Lurah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Kampung Dagang Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu?**

## 1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1.3.1 Tujuan Penelitian

Dengan telah ditetapkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini ingin mengetahui dan menganalisis tingkat Kepemimpinan Lurah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Kampung Dagang Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini ialah :

- a. Dengan adanya penelitian diharapkan berguna bagi penulis untuk mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan serta pengalaman yang penulis peroleh selama mengikuti perkuliahan atau juga selama mengadakan penelitian.
- b. Sebagai bahan masukan dan informasi serta bahan pertimbangan bagi peneliti lain yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut dalam aspek yang berhubungan.
- c. Memberikan gambaran bagi pemerintah dan pihak terkait tentang faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Kampung Dagang Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Dalam memudahkan pembahasan, penulis membagi kedalam enam bab, yang masing-masing bab berhubungan satu dengan yang lainnya. Adapun pembagian bab-bab tersebut adalah sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini adalah bab pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

## BAB II : LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan pustaka, hipotesis, serta variable penelitian.

## BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini dikemukakan tentang lokasi dan waktu penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data, serta analisis data.

## BAB IV : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini berisikan tentang gambaran secara umum mengenai daerah penelitian.

## BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini dibahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan masalah.

## BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan atas hasil penelitian dan pembahasan, guna membantu menyelesaikan permasalahan yang ada pada perusahaan diberikan beberapa saran.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1. Kepemimpinan**

Kepemimpinan memainkan peranan yang dominan, krusial, dan kritikal dalam keseluruhan upaya untuk meningkatkan produktivitas kerja, baik pada tingkat individual, pada tingkat kelompok, dan pada tingkat organisasi. Dikatakan demikian karena seperti telah disinggung di muka, produktivitas kerja tidak hanya disoroti dari sudut pandang produktivitas para tenaga pelaksana berbagai kegiatan operasional yang pada umumnya bersifat teknis akan tetapi juga dari produktivitas kelompok kerja dan bahkan juga produktivitas manajerial.

Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain, dalam hal ini para bawahannya, sedemikian rupa sehingga orang lain itu mau melakukan kehendak pemimpin meskipun secara pribadi hal itu mungkin tidak disenanginya'. (Sondang P. Siagian, 2002: Jika definisi itu disimak dengan cermat akan terlihat paling sedikit tiga hal, yaitu :

- a. Dari seorang yang menduduki jabatan pemimpin dituntut kemampuan tertentu yang tidak dimiliki oleh sumber daya manusia lainnya dalam organisasi.
- b. Kepengikutan sebagai elemen penting dalam menjalankan kepemimpinan, dan

- c. Kemampaun mengubah ‘egosentrisme’ para bawahan menjadi ‘organisasi-sentrisme’.

Masalah seputar kepemimpinan kemungkinan sudah sering ditulis, diteliti secara formal, dan secara informal dibahas melebihi topik-topik lain. Sekalipun demikian, masih ada kontroversi mengenai kepemimpinan. (Fred Luthans, 2006:637) Sebagai contoh, seperti yang tertulis dalam artikel seorang guru kepemimpinan, Warren Bennis, yang berjudul “The End of Leadership”, dikatakan bahwa kepemimpinan yang efektif tidak dapat tercapai tanpa inklusi penuh, inisiatif, dan kerja sama karyawan. Dengan kata lain, seseorang tidak bisa menjadi pemimpin yang hebat pengikut.

### 1. Motivasi

Motivasi dapat diartikan sebagai suatu daya pendorong (*driving force*) yang menyebabkan orang berbuat sesuatu atau yang diperbuat karena takut akan sesuatu. Misalnya seseorang ingin naik pangkat atau naik gaji, maka perbuatannya akan menunjang pencapaian keinginan tersebut. (Sedarmayanti, 2009 : 66).

Motif seringkali diistilahkan sebagai dorongan. Dorongan atau tenaga tersebut merupakan gerak jiwa dan jasmani untuk berbuat. Sehingga motif tersebut merupakan *driving force* yang menggerakkan manusia untuk bertingkah laku dan didalam perbuatannya itu mempunyai tujuan tertentu.

Motivasi adalah proses yang dimulai dengan defisiensi fisiologis atau psikologis yang menggerakkan perilaku atau dorongan yang ditujukan untuk atau insentif. Dengan demikian, kunci untuk memahami proses motivasi tergantung pada pengertian dan hubungan antara kebutuhan, dorongan dan insentif. (Luthans, 2006 : 270).

Motivasi pada dasarnya merupakan interaksi seseorang dengan situasi tertentu yang dihadapinya. Dalam diri seseorang terdapat “Kebutuhan” atau “keinginan” (*want*) terhadap objek di luar diri seseorang tersebut, kemudian bagaimana seseorang tersebut menghubungkan antara kebutuhan dengan “situasi diluar” objek tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan yang dimaksud. Oleh sebab itu, motivasi adalah suatu alasan (*reasoning*) seseorang untuk bertindak dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. (Notoadmojo, 2009 : 115).

Dari berbagai pendapat diatas, dapat disimpulkan yaitu motivasi merupakan dorongan/daya yang timbul dari diri, tanpa ada paksaan dari siapapun untuk melakukan suatu pekerjaan. Telah lama diketahui bahwa manusia adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial ia membutuhkan rasa sayang, pengakuan keberadaan, rasa ingin memiliki berbagai kebutuhan tersebut, manusia bekerja dan berusaha dengan sekuat tenaga untuk memenuhi keinginan itu. Setiap manusia mempunyai *needs* (kebutuhan, dorongan, *intrinsic* dan *extrinsic factor*), yang pemunculannya sangat tergantung dari kepentingan individu. Dengan kenyataan ini, kemudian A. Maslow membuat “*needs hierarchy theory*” untuk menjawab tentang tingkatan kebutuhan manusia tersebut.

Selanjutnya terdapat beberapa kebutuhan manusia yang diklasifikasi menjadi lima hierarki kebutuhan yaitu : (Siagian, 2006 : 149- 155).

#### 1. Kebutuhan Fisiologis ( *Physiological Needs* )

Perwujudan dari kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan pokok manusia yaitu sandang, pangan, papan, dan kesejahteraan individu. Kebutuhan ini dipandang sebagai kebutuhan yang paling mendasar, karena tanpa pemenuhan kebutuhan tersebut, seseorang tidak dapat dikatakan hidup normal.

## 2. Kebutuhan rasa aman (*Safety Needs*).

Kebutuhan keamanan harus dilihat dalam arti luas, tidak hanya diartikan dalam arti keamanan fisik semata, tetapi juga keamanan psikologis dan perlakuan yang adil dalam pekerjaan. Karena pemuas kebutuhan ini terutama dikaitkan dengan kekaryaan seseorang, artinya keamanan dalam arti fisik termasuk keamanan seseorang di daerah tempat tinggal, dalam perjalanan menuju ke tempat bekerja, dan keamanan di tempat kerja.

## 3. Kebutuhan Sosial (*Social needs*)

Manusia pada hakekatnya adalah makhluk sosial, tidak dapat memenuhi kebutuhan sendiri dan pasti memerlukan bantuan orang lain, sehingga mereka harus berinteraksi dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan sosial tercermin dalam empat bentuk perasaan yaitu:

- a. Kebutuhan akan perasaan diterima orang lain dengan siapa ia bergaul dan berinteraksi dalam organisasi dan demikian ia memiliki *sense of belonging* yang tinggi.
- b. Harus diterima sebagai kenyataan bahwa setiap orang mempunyai jati diri yang khas dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Dengan jati dirinya itu, setiap manusia merasa dirinya penting, artinya ia memiliki *sense of importance*.
- c. Kebutuhan akan perasaan maju dan tidak akan gagal sering disebut *sense of accomplishment*. Tidak ada orang yang merasa senang apabila ia menemui kegagalan, sebaliknya, ia senang apabila ia menemui keberhasilan.
- d. Kebutuhan akan perasaan diikutsertakan (*sense of participation*).

Kebutuhan ini sangat terasa dalam hal pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan tugas sendiri. Sudah barang tentu bentuk dari partisipasi itu dapat beraneka ragam seperti dikonsultasikan, diminta memberikan informasi, didorong memberikan saran.

## 4. Kebutuhan akan harga diri (*Esteem Needs*).

Semua orang memerlukan pengakuan atas keberadaan statusnya oleh orang lain. Situasi yang ideal adalah apabila *prestise* itu timbul akan menjadikan prestasi seseorang. Akan tetapi tidak selalu demikian, karena dalam hal ini semakin tinggi kedudukan seseorang, maka akan semakin banyak hal yang digunakan sebagai simbol statusnya itu.

## 5. Aktualisasi diri (*Self Actualization*).

Hal ini dapat diartikan bahwa dalam diri seseorang terdapat kemampuan yang perlu dikembangkan, sehingga dapat memberikan sumbangsih yang besar terhadap kepentingan organisasi. Melalui kemampuan kerja yang semakin meningkat

akan semakin mampu memuaskan berbagai kebutuhannya dan pada tingkatan ini orang cenderung untuk selalu mengembangkan diri serta berbuat yang lebih baik.

Ada dua metode motivasi yaitu motivasi langsung dan motivasi tidak langsung: (<http://bidanlia.blogspot.com/2009>)

a. Motivasi langsung (Direct motivation)

Motivasi langsung adalah motivasi (materiil dan nonmateriil) yang diberikan secara langsung kepada setiap individu untuk memenuhi kebutuhan serta kepuasannya. Jadi sifatnya khusus, seperti pujian, penghargaan, tunjangan, dan bonus.

b. Motivasi tidak langsung (indirect motivation)

Motivasi tidak langsung adalah motivasi yang diberikan merupakan fasilitas-fasilitas yang mendukung serta menunjang gairah seseorang/kelancaran tugas sehingga seseorang betah dan bersemangat melakukan pekerjaannya.

Selanjutnya juga dijelaskan mengenai beberapa Asas-Asas Motivasi sebagai berikut : (Hasibuan, 2006 : 98 ).

1. Asas mengikutsertakan, artinya mengajak bawahan untuk ikut serta dalam berpartisipasi dan memberikan kesempatan untuk mengajukan pendapat sebagai rekomendasi dalam pengambilan keputusan.
2. Asas komunikasi, artinya menginformasikan secara jelas tentang tujuan yang ingin dicapai, cara mengerjakannya dalam kendala yang dihadapi.
3. Asas pengakuan, artinya memberikan penghargaan, pujian dan pengakuan yang tepat serta wajar kepada bawahan atas prestasi kerja yang dicapainya.
4. Asas wewenang yang didelegasikan, artinya memberikan kewenangan dan kepercayaan diri kepada bawahan, bahwa dengan kemampuan dan kreatifitasnya mampu mengerjakan tugas dengan baik.
5. Asas adil dan layak, artinya alat dan jenis motivasi yang diberikan harus berdasarkan atas keadilan dan kelayakkan terhadap semua pegawai. Misalnya pemberian hadiah dan hukuman terhadap semua pegawai harus adil dan layak bila masalahnya sama.
6. Asas perhatian timbal balik, artinya bawahan yang berhasil mencapai tujuan dengan baik maka pimpinan harus bersedia memberikan alat dan jenis motivasi. Tegasnya kerja sama yang saling menguntungkan kedua belah pihak.

Motivasi bersifat jangka panjang. Inspirasi lebih lanjut diberikan kepada bawahan yang penuh motivasi dengan mempercayai mereka untuk bekerja berdasarkan inisiatifnya sendiri dan mendorong mereka menerima tanggung jawab seluruh pekerjaan. Untuk bawahan yang demotivasi perlu ditemukan apa yang dapat memotivasi mereka dan menjalankan apapun yang dapat membantu mereka. Individu yang penuh dengan motivasi sangat penting untuk memasok organisasi dengan inisiatif baru yang sangat penting dalam dunia yang penuh kompetisi.

Sedangkan motivator adalah yang sebenarnya mendorong orang untuk mendapatkan kebutuhannya. Inilah yang harus dilakukan manajer untuk memelihara tenaga kerja yang puas. Seberapa banyak orang menikmati prestasi tergantung pada pengakuannya. Sebagai motivator adalah Prestasi, Pekerjaan, tanggung jawab dan kemajuan. (Wibowo, 2007 : 380-381).

## ***2.Programmed Decision(keputusan terprogram).***

Pengambil keputusan mempunyai suatu cara untuk dapat memahami informasi yang menentukan efisiensi pengolahan informasinya. Pengetahuan seseorang digabungkan dengan kecakapannya mengolah informasi akan menentukan kesanggupannya mengambil keputusan.

Dihadapkan dengan alternatif-alternatif, pengambil keputusan menentukan suatu tujuan, dan kemudian berusaha mencapainya dengan memilih alternatif yang terbaik berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya. Pengambilan keputusan merupakan suatu proses penggunaan informasi secara rasional bukan secara emosional. Dengan demikian dalam hubungan ini, kesulitan dalam pengambilan keputusan dapat diakibatkan oleh kedua-duanya.

Pengambilan keputusan merupakan fungsi utama dari seorang manajer dalam suatu organisasi (perusahaan). Kegiatan pengambilan keputusan ini sering menjadi kegelisahan tersendiri bagi manajer dalam suatu perusahaan. Hal ini disebabkan keputusan yang telah dibuat akan mengikat seluruh komponen dalam perusahaan untuk melaksanakan hasil keputusan tersebut. Dengan demikian tidak mudah bagi manajer untuk membuat keputusan, karena hal itu akan menyangkut aktivitas orang banyak. (<http://nadya-nandy.blogspot.com/2010/06/membuat-keputusan.html>).

Jika pilihan dijatuhkan pada tiga peran yang harus dimainkan seorang pemimpin dalam organisasi, mungkin akan banyak organisasi akan menjatuhkan pilihan pada peran ketiga ini peranan ini mengambil 4 bentuk peran yaitu : (Siagian, 2002 : 68).

- 1) Pelaku entrepreneur
- 2) Peredam gangguan
- 3) Pembagi sumber dana dan daya
- 4) Perunding bagi organisasi.

Pengambilan keputusan dapat dianggap sebagai suatu hasil atau keluaran dari proses mental atau kognitif yang membawa pada pemilihan suatu jalur tindakan di antara beberapa alternatif yang tersedia. Setiap proses pengambilan keputusan selalu menghasilkan satu pilihan final. Keluarannya bisa berupa suatu tindakan (aksi) atau suatu opini terhadap pilihan. 1) Dengan kata lain Pengambilan Keputusan adalah Pemilihan alternatif solusi untuk suatu masalah. 2) Dimana pikiran kita menentukan keputusan yang kita ambil. 3) Serta keputusan harus diikuti dengan tindakan jika diharapkan menimbulkan dampak dari efek yang langgeng.

Pengambilan keputusan adalah suatu proses organisasi karena hal tersebut melebihi individu dan mempunyai efek pada tujuan organisasi. Pertama, proses pengambilan keputusan dieksplorasi. Selanjutnya model dan gaya pengambilan keputusan berkaitan dengan perilaku dideskripsikan. Kemudian, teknik partisipasi modern atau tradisional dibahas. Akhirnya dibahas proses

kreatif dan teknik pengambilan keputusan kelompok. (Luthan, 2006 : 406).

Proses pembuatan keputusan individu yang dihasilkan oleh manager dapat dibedakan menjadi dua macam, pertama *rational approach* pendekatan ini menuntut manager untuk membuat keputusan dan kedua adalah *bounded rationality perspective* yang menjelaskan bagaimana keputusan dibuat dibawah keterbatasan waktu dan sumber daya.

Keputusan terprogram merupakan keputusan yang dilakukan secara rutin dan berulang. Keputusan itu diambil karena adanya kebijaksanaan, peraturan dan dijadikan patokan pelaksanaan operasional. Contohnya kenaikan gaji secara berkala bagi pegawai yang sesuai ketentuan atau yang sudah memenuhi syarat. Unit kepegawaian dalam penyelesaian semacam ini tidak perlu lagi meminta petunjuk kepada pimpinan atas , sebab sudah ada pedoman dan standar yang dapat diikuti demikian dengan format administrasi dan sebagainya.

Pendekatan proses pengambilan keputusan secara rasional sangat sulit dilakukan karena pada kenyataannya manager dalam dunia nyata dituntut untuk melakukan pengambilan keputusan yang cepat, sehingga dalam pengambilan keputusan manager akan terbatas oleh waktu, faktor internal dan eksternal serta sifat alamiah suatu permasalahan yang tidak memungkinkan untuk dilakukannya suatu analisa menyeluruh terhadap permasalahan tersebut.

Dalam proses pengambilan keputusan, semua informasi yang diperlukan disusun dalam bentuk ringkasan hasil yang disebut sebagai tabel hasil *payoff table*. Pengambilan keputusan pada kondisi ketidakpastian(*decision making under uncertainty*) mengasumsikan pengambilan keputusan tidak tahu dengan pasti hasil yang mungkin



terjadi dari setiap alternative, bahkan probabilitasnya sekalipun. (Herjanto, 2007 : 26-27).

Didalam proses pengambilan keputusan terdapat 6 langkah awal yang perlu diperhatikan dan diterapkan antara lain, yaitu :(<http://f4ilkom.blogspot.com/2012/05/pengambilan-keputusan-bab-ii-pembahasan.html>).

1. Pengenalan Persyaratan Keputusan.  
Manajer menghadapi persyaratan sebuah keputusan dalam bentuk permasalahan atau peluang. *Permasalahan* timbul ketika pencapaian organisasi kurang dari yang telah ditetapkan. Sejumlah aspek kinerja tidak memuaskan. *Peluang* timbul ketika manajer melihat pencapaian potensial yang melebihi tujuan yang ditetapkan saat ini. Kesadaran akan permasalahan atau peluang merupakan langkah awal dalam alur keputusan.
2. Diagnosis dan Analisis Penyebab.  
Ketika suatu permasalahan atau peluang diperhatikan seorang manajer, pemahaman dari situasi ini harus ditingkatkan. *Diagnosis* adalah langkah dalam proses pengambilan keputusan dimana manajer menganalisis faktor penyebab mendasar yang dikaitkan dengan situasi keputusan.
3. Pengembangan Alternatif.  
Pengambilan keputusan mulai mempertimbangkan untuk melakukan tindakan, tahap ini adalah mengumpulkan solusi alternatif yang memungkinkan, yang akan merespon kebutuhan situasi dan mengoreksi penyebab dasar. Dimana seorang manajer mengumpulkan seluruh alternatif keputusan yang mungkin dapat dilaksanakan dengan memperhatikan tujuan perusahaan.
4. Pemilihan Alternatif yang Diinginkan.  
Setelah alternatif yang diinginkan dikembangkan, salah satu diantaranya harus dipilih. *Pilihan keputusan* adalah seleksi atas sejumlah alternatif arah tindakan yang menjanjikan. *Alternatif terbaik* adalah solusi yang paling sesuai dengan keseluruhan tujuan dan nilai organisasi dan mencapai hasil yang diinginkan dengan menggunakan sumber daya seminimal mungkin.
5. Implementasi Alternatif yang Dipilih  
Tahap *Implementasi* meliputi penggunaan kemampuan manajerial, administratif, dan persuasif untuk menjamin alternatif yang dipilih akan dijalankan.
6. Evaluasi dan Umpan Balik  
Pada tahap evaluasi dalam proses keputusan, pengambil keputusan mengumpulkan informasi yang memberi tahu mereka bahwa

keputusan diimplementasikan dan apakah hal itu efektif dilakukan untuk pencapaian tujuan. Mampu mendahulukan mana yang lebih penting dan mana yang kurang penting, merupakan salah satu faktor yang dapat menunjang kesuksesan.

Hal ini menjadikan pengambilan keputusan secara rasional menjadi terbatas (*bounded rationality perspective*). Pengambilan keputusan menggunakan pendekatan ini umumnya lebih menekankan pada aspek intuisi, pengalaman dan penilaian (*judgement*) dibandingkan dengan langkah-langkah logis. Intuisi tidak selalu bersifat irasional, karena intuisi didasarkan atas pengalaman bertahun-tahun dari seorang manajer terhadap pekerjaannya yang telah tersimpan di alam bawah sadarnya. Intuisi akan menghasilkan keberanian serta firasat mengenai alternatif keputusan mana yang diperkirakan dapat memecahkan permasalahan, sehingga intuisi akan mempersingkat waktu dalam pengambilan keputusan.

Keputusan Terprogram adalah keputusan yang berulang dan telah ditentukan sebelumnya, dalam keputusan terprogram prosedur dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami organisasi. Keputusan terprogram memiliki struktur yang baik karena pada umumnya kriteria bagaimana suatu kinerja diukur sudah jelas, informasi mengenai kinerja saat ini tersedia dengan baik, terdapat banyak alternatif keputusan, dan tingkat kepastian relatif yang tinggi. (<http://icecube.blogstudent.mb.ipb.ac.id/2010/07/13/pengambilan-keputusan>).

Keputusan tidak terprogram tidak ada prosedur baku yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan. Keputusan ini dilakukan ketika organisasi menemui masalah yang belum pernah mereka alami sebelumnya, sehingga organisasi tidak dapat memutuskan bagaimana merespon permasalahan tersebut, sehingga terdapat ketidakpastian apakah solusi yang diputuskan dapat menyelesaikan permasalahan atau tidak, akibatnya keputusan

tidak terprogram menghasilkan lebih sedikit alternatif keputusan dibandingkan dengan keputusan terprogram selain itu tingginya kompleksitas dan ketidakpastian keputusan tidak terprogram pada umumnya melibatkan perencanaan strategik.

Pengambilan keputusan adalah kegiatan-kegiatan yang meliputi perumusan masalah, penambahan alternatif dan penilaian kegiatan yang meliputi perumusan masalah, pembahasan alternatif, dan penilaian serta pemilihan sebagai penyelesaian masalah. Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebelum keputusan diambil harus terlebih dahulu diketahui pokok permasalahan yang dihadapi, bukan sekedar isu yang tidak memerlukan penyelesaian. (Azhar, 2002 : 79).

Pada level organisasi keputusan yang dibuat umumnya tidak berasal dari satu manajer tapi merupakan kombinasi keputusan yang melibatkan seluruh manajer pada suatu organisasi.

Terdapat 5 dasar (basis) dalam pengambilan keputusan, yaitu: 1) intuisi 2) pengalaman 3) fakta 4) wewenang; dan 5) rasional. (George, 2005 : 68).

### **1) Intuisi.**

Pengambilan keputusan berdasarkan intuisi adalah pengambilan keputusan yang berdasarkan perasaan yang sifatnya subyektif. Dalam pengambilan keputusan berdasarkan intuisi ini, meski waktu yang digunakan untuk mengambil keputusan relatif pendek, tetapi keputusan yang dihasilkan seringkali relatif kurang baik karena seringkali mengabaikan dasar-dasar pertimbangan lainnya.

### **2) Pengalaman.**

Pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman memiliki manfaat bagi pengetahuan praktis, karena dengan pengalaman yang dimiliki seseorang, maka dapat memperkirakan keadaan sesuatu, dapat memperhitungkan untung-ruginya dan baik-buruknya keputusan yang akan dihasilkan.

### **3) Wewenang.**

Pengambilan keputusan berdasarkan wewenang biasanya dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahannya, atau oleh orang yang lebih tinggi kedudukannya kepada orang yang lebih rendah

kedudukannya. Hasil keputusannya dapat bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama dan memiliki otentisitas (otentik), tetapi dapat menimbulkan sifat rutinitas, mengasosiasikan dengan praktek diktatorial dan sering melewati permasalahan yang seharusnya dipecahkan sehingga dapat menimbulkan kekaburan

#### **4) Fakta.**

Pengambilan keputusan berdasarkan data dan fakta empiris dapat memberikan keputusan yang sehat, solid dan baik. Dengan fakta, tingkat kepercayaan terhadap pengambil keputusan dapat lebih tinggi, sehingga orang dapat menerima keputusan yang dibuat itu dengan rela dan lapang dada.

#### **5) Rasional.**

Pada pengambilan keputusan yang berdasarkan rasio, keputusan yang dihasilkan bersifat objektif, logis, lebih transparan dan konsisten untuk memaksimalkan hasil atau nilai dalam batas kendala tertentu, sehingga dapat dikatakan mendekati kebenaran atau sesuai dengan apa yang diinginkan. Pengambilan keputusan secara rasional ini berlaku sepenuhnya dalam keadaan yang ideal.

Terdapat 4 macam kategori keputusan dalam proses pengambilan keputusan antara lain, yaitu: (Supranto, 2001 : 45).

##### **1) Keputusan dengan kepastian (*Certainly*)**

Berarti informasi yang dibutuhkan pengambil keputusan tersedia lengkap. Para manajer memiliki informasi mengenai kondisi operasi, biaya atau batasan-batasan sumberdaya, dan masing-masing tindakan dan kemungkinan perolehan hasil.

##### **2) Keputusan dengan ketidakpastian (*uncertainly*)**

Bahwa manajer tahu sasaran mana yang ingin dicapai tetapi informasi yang didapat mengenai alternatif dan kejadian-kejadian di masa depan tidak lengkap. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya adalah harga, biaya produksi, volume atau tingkat suku bunga masa depan, sulit dianalisis dan diprediksi.

##### **3) Keputusan dengan risiko.**

Bahwa sebuah keputusan memiliki sasaran jelas dan didasarkan pada informasi yang baik, namun demikian konsekuensi-konsekuensi masa depan dari masing-masing alternatif keputusan tidak pasti.

##### **4) Keputusan dengan konflik (*ambiguitas*)**

Bahwa sasaran yang ingin diraih tidak jelas, dan alternatif sulit didefinisikan dan informasi mengenai hasil yang diharapkan tidak tersedia.

## 2.2. Teori Partisipasi

Wahyudi Kumorotomo dalam Sondang P. Siagian (2005:136-138) menyatakan bahwa partisipasi warga Negara dibedakan menjadi empat macam, yakni :

- a. Partisipasi dalam Pemilihan (*electoral participation*)
- b. Partisipasi Kelompok (*group participation*)
- c. Kontrak antara warga Negara dan Pemerintah (*citizen-government contracting*); dan
- d. Partisipasi Warga Negara secara langsung di lingkungan Pemerintah.

Menurut Josef Riwu Kaho, (2002:111-112), bagi setiap Negara yang demokratis (termasuk Indonesia), bagaimana pun akan melibatkan warganya dalam proses politik, hal ini setidaknya didasarkan pada pertimbangan, yaitu: *Pertama*, bila setuju bahwa aturan main politik yang memberikan kesempatan pada ‘yang diperintah’ yakni Pemerintah dan untuk mempengaruhi tingkah lakunya dalam memerintah ialah aturan main yang menghormati harkat manusia, dan bila setuju bahwa penghormatan maupun peningkatan harkat manusia yaitu inti masalah kualitas manusia, maka pembahasan peran serta masyarakat cukup gayuh. Kedua, kenyantaannya bahwa setiap pemerintah dimana pun saja apapun corak ideologinya dan bagaimana pun otoritasnya, tidak bisa mengabaikan begitu saja soal pemberian saluran bagi peran serta masyarakatnya.

Sementara itu, (Meriam Budiarjo dalam Josef Riwu Kaho, 2002:112) bahwa adanya partisipasi masyarakat didasarkan pada

pertimbangan ‘bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat yang melaksanakannya melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan serta masa depan masyarakat itu dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk pimpinan untuk masa berikutnya”.

Secara umum jenis partisipasi yang ada dan tumbuh di dalam masyarakat dapat dilihat (Sastropoetra, 1998:43), seperti:

- a. Partisipasi dengan pikiran;
- b. Partisipasi dengan tenaga;
- c. Partisipasi dengan keahlian;
- d. Partipasi dengan uang; dan
- e. Partisipasi dengan jasa-jasa

- a. Partisipasi dengan pikiran

Pikiran yaitu “hasil dari memikirkan; akal, ingatan; maksud, niat” (Tim Prima Pena, 2007:611), maka dengan hal ikut serta dalam suatu berupa hasil dari memikirkan, merupakan wujud dari partisipasi dengan pikiran. Sehingga dengan pikiran masyarakat mewujudkan sikap berupa keikutsertaannya dalam rencana dan program yang dicanangkan dan dibuat oleh pemerintah guna tujuan mencapai cita-cita demi kesejahteraan semua anggota atau warga masyarakat.

- b. Partisipasi dengan tenaga

Tenaga yaitu “kekuatan, daya yang dapat menggerakkan sesuatu, kegiatan bekerja atau berusaha” (Tim Prima Pena, 2007:748), biasanya masyarakat menggunakan tenaga yang ada pada dirinya atau badannya

sendiri berupa ikut bekerja melakukan usaha mencapai sesuatu tujuan yang diharapkan untuk kepentingan bersama, maka partisipasi dengan tenaga ialah ikut kepentingan bersama, maka partisipasi dengan tenaga ialah ikut serta dalam suatu kegiatan, meluangkan waktu dan turut serta berusaha menggunakan kekuatan diri guna berusaha mencapai tujuan yang diharapkan untuk kepentingan bersama.

c. Partisipasi dengan keahlian

Keahlian berasal dari kata ‘ahli’ yaitu “orang yang mempunyai ilmu khusus, mahir, pandai sekali, paham sekali tentang suatu disiplin Negara”. Keahlian’ yaitu kemahiran dalam suatu ilmu atau pekerjaan (Tim Prima Pena, 2007:22) sehingga partisipasi dengan keahlian ialah ikut serta melakukan kegiatan dengan menggunakan kemahiran dalam suatu ilmu atau kepandaian guna mencapai tujuan yang diharapkan untuk kepentingan bersama.

d. Partisipasi dengan uang

Uang yaitu “alat pembayaran yang sah, alat pengukur nilai yang dikeluarkan oleh pemerintah” (Tim Prim Pena, 2007:780), maka partisipasi dengan uang ialah turut serta mencapai tujuan yang diharapkan untuk kepentingan bersama dengan menggunakan alat pembayaran yang sah, atau alat pengukur nilai yang dikeluarkan oleh pemerintah.

e. Partisipasi dengan jasa-jasa

Jasa yaitu “tindakan yang baik dan berguna bagi orang, kelompok masyarakat, bangsa dan Negara” (Tim Prima Pena, 2007:362), jasa-jasa ialah melakukan tindakan-tindakan yang berguna bagi orang atau kelompok masyarakat, maupun bagi bangsa dan negara. Sehingga partisipasi dengan jasa-jasa ialah ikut serta dalam kegiatan dengan melakukan tindak-tindakan yang berguna bagi orang atau kelompok masyarakat, maupun bagi bangsa dan Negara.

Selain itu, ada factor-faktor lain yang sangat erat kaitannya dengan partisipasi masyarakat dalam hal ini (Panggabean, 1998:15) yaitu:

1. Tingkat pendidikan,
2. Tingkat pendapatan,
3. Jarak tempat tinggal,
4. Sikap dan
5. Penyuluhan yang diberikan.

Secara sederhana dapat diasumsikan bahwa partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan suatu perorangan yang dilandasi dengan adanya pendidikan, penghasilan atau biaya yang dapst dibayar, jarak tempat tinggal yang semakin dekat atau waktu yang efisien, serta sikap atau perilaku yang baik maupun penyuluhan atau sosialisasi yang sering dilakukan, dan administrasi birokrasi yang professional, akan semakin meningkatkan partisipasi masyarakat.



### 2.3. Pajak

Pada mulanya pajak belum merupakan suatu pungutan, tetapi hanya merupakan pemberian sukarela dalam memelihara kepentingan negara, seperti menyediakan jalan umum, membayar gaji pegawai dan lain sebagainya. Dengan bertambah luasnya tugas-tugas negara, maka dengan sendirinya negara melakukan biaya yang cukup besar, sehubungan dengan itu maka pembayaran pajak yang tadinya bersifat sukarela bertambah menjadi pembayaran yang ditetapkan secara sepihak oleh negara dalam bentuk undang-undang dan dapat dipaksakan. Secara historis, pembicaraan mengenai masalah pajak selalu didahului dengan menentukan terlebih dahulu kebijakan perpajakan (*tax policy*), kemudian kebijakan perpajakan tersebut diolah dan ditetapkan dalam bentuk undang-undang perpajakan (*tax law*) dan barulah kemudian dibahas masalah yang menyangkut pemungutannya oleh aparat perpajakan yang termasuk dalam ruang lingkup administrasi perpajakan (*tax administration*).

Hubungan antara ketiga unsur tersebut (*tax policy*, *tax law*, *tax administration*) dapat diumpamakan dengan sebuah kursi yang mempunyai kaki, dimana kaki-kakinya adalah kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan dan administrasi perpajakan. Tanpa kaki-kaki tersebut sama panjangnya dan sama kuatnya, maka kursinya tidak akan stabil dan apabila salah satu dari kakinya lebih pendek, biasanya administrasi perpajakan, hal ini berarti adanya kelemahan struktural. Apabila kaki-kaki tersebut semakin lemah, maka ini berarti bahwa seluruh sistem perpajakan akan menjurus ke

keruntuhan, sedang kita ketahui bahwa tujuan dari suatu sistem perpajakan yang terdiri dari kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan dan administrasi perpajakan tersebut, adalah untuk menjamin agar tetap dapat dilaksanakannya dalam jangka panjang kebijakan fiskal dan program-program pemerintah yang sudah merupakan rencana pemerintah, sedang tujuan utama administrasi perpajakan adalah agar sistem perpajakan yang sedang dipilih tersebut dapat dilaksanakannya dengan sepenuhnya.

Disamping itu, ternyata pula ketiga unsur sistem perpajakan tersebut saling tergantung satu sama lainnya dan untuk mencapai suatu sistem perpajakan yang sehat secara menyeluruh, diperlukan kesadaran yang lebih tinggi akan saling ketergantungan tersebut. Bahkan mereka yang selama ini menganggap salah satu dari faktor tersebut, apakah kebijakan perpajakan ataupun undang-undang perpajakannya yang terpenting, dewasa ini menyadari pada akhirnya kualitas administrasi perpajakan merupakan faktor yang sama pentingnya dengan kerangkanya sendiri. Seperti diketahui, kebijakan perpajakan dan undang-undang perpajakan merencanakan dan menyediakan struktur yang sah dan struktur yang sah tersebut merupakan kerangka dimana administrasi perpajakan yang efektif harus dibangun. Kewajiban untuk memperbaiki sistem perpajakan merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan secara terus menerus dan sistem tersebut hendaknya selalu disesuaikan dengan keadaan yang mutakhir (*up to date*) yang sejalan dengan perubahan-perubahan aktifitas dan struktur perdagangan, perubahan dalam

hidup keluarga dan pemilikan kekayaan serta perubahan-perubahan dalam tujuan ekonomi dan sosial masyarakat.

Penghasilan negara adalah berasal dari rakyatnya melalui pungutan pajak dan dari hasil kekayaan alam yang ada di dalam negara itu. Dua sumber itu merupakan sumber yang terpenting yang memberikan penghasilan kepada negara. Maka dapat dikatakan penghasilan itu untuk membiayai kepentingan umum seperti kesehatan rakyat, pendidikan, kesejahteraan dan sebagainya. Jadi, dimana ada kepentingan masyarakat, maka disitu timbul pungutan pajak. Para ahli dalam bidang perpajakan memberikan definisi atau pengertian yang berbeda-beda mengenai pajak, namun demikian berbagai definisi atau pengertian pajak tersebut mempunyai inti dan tujuan yang sama.

Berikut pengertian-pengertian menurut para ahli yang penulis kutip. Menurut Rochmat Soemitro yang dikutip oleh Mardiasmo menyatakan bahwa :“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. (2002:1)

Menurut Waluyo (2011:4) menyatakan bahwa pengertian pajak sebagai berikut :“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan. Dengan tidak mendapat kontra prestasi kembali yang langsung dapat ditujuk dan yang kegunaannya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran

umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa pajak merupakan iuran yang dikenakan kepada rakyat yang dapat dipaksakan untuk membiayai pengeluaran umum dengan memiliki dasar yaitu undang - undang tanpa imbalan secara langsung.

#### **2.4. Pajak Daerah**

Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Mardiasmo (2009: 123)

Pajak daerah terdiri atas:

- Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- Pajak Kabupaten/ Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak restoran, dan Pajak Hiburan.

#### **2.5. Pajak Bumi dan Bangunan**

Bumi dan Bangunan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan / atau bangunan berdasarkan Undang-undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 1994. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi / tanah dan / atau bangunan, keadaan subyek (siapa yang membayar) tidak ikut

menentukan besarnya pajak. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak pusat dimana presentase pembagian hasil penerimaannya sebagian besar dialokasikan ke daerah.

Ada pun pengertian Pajak Bumi dan Bangunan menurut para ahli diantaranya : Menurut Erly Suandy, (2005:61), pengertian Pajak Bumi dan Bangunan dalam adalah : “Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dan besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi / tanah / dan bangunan keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarpajak”.

Menurut Siti Resmi (2004:611), menyatakan bahwa sebelum mengemukakan pengertian tentang Pajak Bumi dan Bangunan Undang – Undang No 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagai berikut :1. Bumi adalah permukaan / tubuh bumi yang dibawahnya, permukaan meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa tambak perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia. Bangunan adalah konstruksi teknis yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan untuk tempat tinggal, tempat usaha, dan tempat yang diusahakan.

Menurut Waluyo (2003:12) menyatakan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan seperti berikut :1. Bumi adalah permukaan / tubuh bumi yang dibawahnya, permukaan meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa tambak perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia. 2. Bangunan adalah

kontruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan.

Dari pengertian Pajak bumi dan Bangunan diatas maka penulis dapat menyimpulkan Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas tanah dan bangunan yang ditempati atau dimanfaatkan kenikmatannya oleh orang atau badan. Asas Pajak Bumi dan Bangunan Untuk memberikan kenyamanan bagi para wajib pajak, tercantum dalam asas Pajak Bumi dan Bangunan.

Menurut Mardiasmo (2003:261),pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan diatur dalam beberapa asas yang meliputi antara lain :1. Memberikan kemudahan dan kesederhanaan 2. Adanya kepastian hukum 3. Mudah dimengerti dan adil. Menghindari pajak yang berganda

Berdasarkan pernyataan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa asas Pajak Bumi dan Bangunan dapat memberikan kemudahan, kepastian hukum, mudah dimengerti, adil dan menghindari pajak yang berganda bagi wajib pajak. Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sebelum menentukan dasar pengenaan dan menghitung besarnya Pajak Bumi dan Bangunan perlu dipahami terlebih dahulu unsur-unsur didalamnya yaitu pengertian dari NJOP, NJOPTK, NJKP dan Tarif Pajak. Menurut Waluyo unsur-unsur Pajak Bumi dan Bangunan terutang perlu dipahami terlebih dahulu adalah :1. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) 2. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJKP) 3. Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) 4. Tarif Pajak (2003:15) Menurut Mardiasmo menyatakan bahwa dasar pengenaan Pajak

Bumi dan Bangunan adalah sebagai berikut :Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Besarnya NJOP ditetapkan setiap tiga tahun oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan pendapat Gubernur / Bupati / Walikota (Pemerintah Daerah) setempat. Dasar perhitungan pajak adalah yang ditetapkan serendah – rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari NJOP. 4. Besarnya presentase ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional.

## **2.6. Konsep Operasional**

Selanjutnya untuk mengarahkan dan memudahkan pembahasan lebih lanjut, maka penulis memberikan definisi operasional sebagai berikut: Kepemimpinan Kepala Kelurahan adalah kemampuan atau kecakapan Kepala Kelurahan sebagai pemimpin dalam membimbing dan membina, memotivasi/memberi dorongan serta mengarahkan masyarakat untuk berpartisipasi di bidang pembangunan. Sub variabel sebagai berikut :

1. Efisiensi secara teknis dan taktis, dengan Sub-indikator : Kepala Kelurahan dapat menerapkan sistem pemungutan PBB yang sederhana.
2. Mengenali diri sendiri dan mencari perbaikan diri sendiri, dengan Sub-indikator:
  - a. Sikap keterbukaan pemimpin terhadap saran atau kritikan yang diterimanya
  - b. Respons atau tanggapan pemimpin terhadap saran atau kritikan yang diterimanya.

3. Mengenali masyarakat dan memelihara kebutuhannya, dengan Sub-indikator:
  - a. Mengadakan Kunjungan baik secara formal maupun informal
  - b. Pemimpin memperhatikan segala kebutuhan masyarakatnya khususnya mengenai pembayaran PBB.
4. Memberikan penerangan kepada masyarakat, dengan Sub-indikator:  
Pemimpin secara rutin memberikan penerangan dan arahan melalui penyuluhan/rapat Kelurahan
5. Memberikan contoh yang baik, dengan Sub-indikator:
  - a. Penampilan berpakaian seorang pemimpin
  - b. Pemimpin turut aktif berpartisipasi dalam pencapaian target PBB.
6. Menjamin bahwa tugas dimengerti, diawasi dan dilaksanakan, dengan Sub-indikator : Pemimpin memberikan perintah yang jelas dan mudah dipahami oleh masyarakatnya.
- 7) Melatih masyarakat sebagai suatu tim, dengan Sub-indikator; Pemimpin dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pencapaian target PBB
- 8) Pemimpin membuat putusan yang bernilai dan tepat pada waktunya, dengan Sub-indikatornya : Proses menemukan masalah, mengembangkan pemahaman dan menganalisa kemungkinan pemecahan masalah serta tindakan lebih lanjut.



9. Mengembangkan rasa tanggung jawab di kalangan masyarakat, dengan Sub-indikatornya: Menegur dan meminta pertanggungjawabannya kepada masyarakat yang selalu telat membayar PBB.
10. Mencari tanggung jawab dan ambil tanggung jawab untuk tindakan-tindakan pemimpin, dengan Sub-indikatornya : Pemimpin bertanggungjawab terhadap organisasi yang dipimpinnya.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### **3.1.1. Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi penelitian ini adalah di Kelurahan Kampung Dagang Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu, dengan alasan bahwa Kelurahan Kampung Dagang Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu merupakan daerah atau wilayah pemerintahan yang memiliki penduduk yang cukup besar, disamping itu juga merupakan wilayah atau daerah pemerintahan yang berkembang cukup pesat seiring perkembangan dari pembangunan daerah Kota Rengat sendiri.

##### **3.1.2. Waktu Penelitian**

Penelitian ini dimulai sejak April hingga bulan Juli tahun 2011, sehingga memakan waktu selama empat bulan. Dalam masa itu harus telah dilakukan observasi dan pra penelitian serta penelitian dan laporan hasil penelitian.

#### **3.2. Jenis dan Sumber Data**

##### **3.2.1. Jenis Data**

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini ialah data kuantitatif, yaitu hal ini sesuai dengan pendapat B .

### 3.2.2. Sumber Data

#### a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dari lapangan secara langsung berdasarkan kuesioner dan observasi.

#### b. Data Skunder

Yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan dan dokumen-dokumen yang berupa data yang diolah atau olahan dari objek penelitian.

### 3.3. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksplanasi. Masri Singarimbun (1989:4) mengatakan bahwa metode eksplanasi adalah “suatu metode yang bermaksud menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis dengan cara menganalisis variabel-variabel yang ditelitinya”

Jenis penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis adalah penelitian korelasi. Menurut Suharsini Arikunto (1998 : 251) , penelitian korelasi bertujuan untuk menentukan ada tidaknya hubungan, dan apabila ada, berapa erat hubungannya, serta berarti atau tidak hubungan itu.

Sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan cara :

- a) Wawancara, Menurut Singarimbun “Salah satu metode pengumpulan data adalah dengan jalan wawancara yaitu mendapatkan informasi dengan bertanya langsung kepada responden” (Singarimbun, *Metode Penelitian Survei*, 1989:3). Wawancara dilakukan secara tidak

terstruktur, baik terhadap anggota sampel maupun populasi pada umumnya, untuk mendapatkan data primer sehingga dapat melengkapi hasil penelitian nantinya. Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan:

1. Kepala Kelurahan Kampung Dagang Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu.
  2. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan
  3. Sebagian masyarakat yang menjadi responden
- b). Kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data pokok dengan jalan mengajukan daftar pertanyaan secara tertulis kepada seluruh objek yang terkait, yaitu masyarakat (Wajib Pajak) yang pernah berhubungan langsung dengan Kepala Kelurahan Kampung Dagang Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu.

### **3.4. Populasi dan Sampel Penelitian**

Guna mempermudah penyebaran angket, populasi dan sampel ditentukan sebagai berikut :

- 1) Unit analisa adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian (Arikunto, 1993:116). Berdasarkan pengertian tersebut dan sesuai dengan variabel yang akan diteliti, maka yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini adalah aparat di lingkungan Kantor Kelurahan dan masyarakat di wilayah Kelurahan Kampung Dagang Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu.
- 2) Populasi. Populasi di definisikan sebagai “Wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.” (Sugiyono, 1999:57). Populasi dalam penelitian ini terbagi atas dua populasi, yaitu:

1. Aparatur pemerintah Kelurahan Kampung Dagang Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu, yang terdiri dari Kepala Kelurahan dan perangkatnya,
2. Masyarakat (wajib pajak) di Kelurahan Kampung Dagang Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu.
- 3) Sampel didefinisikan sebagai “Sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.” (Sugiyono, 1999 : 57)

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat (Wajib Pajak) yang pernah berhubungan langsung dengan Kepala Kelurahan sepanjang bulan April 2011 hingga Juni 2011, yang berjumlah 1.618 orang. Mengingat jumlah populasi dalam penelitian masih cukup besar, serta keterbatasan akan waktu dan biaya, maka penelitian ini hanya menggunakan penelitian sampel.

Untuk mempermudah di dalam mengklasifikasikan sampel penelitian ini, maka sampel penelitian ini akan dikelompokkan berdasarkan kelompok pekerjaan responden. Kelompok pekerjaan yang dimaksud yaitu Pegawai/ABRI, Pengusaha/Pedagang, Karyawan/Buruh, dan Pensiunan.

Selanjutnya, dari sampel yang ditentukan seimbang dipilih secara acak (*random*) masyarakat (Wajib Pajak) yang pernah berhubungan dengan Kepala Kelurahan Kampung Dagang Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu, dengan strata yang didasari dengan metode slovin yaitu pengambilan sampel

berdasarkan kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan, dengan menggunakan batas-batas kesalahan 10%, jadi sampel yang diambil sebanyak 94 orang. Teknik pengambilan sampel dengan *Simple Random Sampling* yaitu karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu.

Untuk menentukan ukuran sampel dari populasi, ada beberapa macam cara yang dikemukakan para ahli, antara lain seperti yang dijelaskan pada berikut ini. Adapun rumus ukuran sampel menurut pendapat Slovin sebagai berikut : (Umar, 2005 :146).

$$n = \frac{N}{1 + N e^2}$$

Dimana :

n = Ukuran sampel

N = Ukuran Populasi

e = Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan.

Untuk ukuran sampel yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

$$n = \frac{1.618}{1 + 1.618 (10 \%)^2}$$

$$n = \frac{1.618}{1 + 1.618 (0,1)^2}$$

$$n = \frac{1.618}{1 + 16,18}$$

$$n = \frac{1.618}{17,18}$$

$$n = 94$$

### **3.5. Analisis Data**

Analisa data dalam penelitian ini dilakukan cara mengungkapkan hasil penelitian dengan mendeskripsikan secara deduktif deskriptif, yaitu berupa uraian yang menggambarkan keadaan sesungguhnya dari objek penelitian yaitu gambaran yang komprehensif tentang Kepemimpinan Lurah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Kampung Dagang Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu.

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN**

#### **A. Sejarah Kelurahan Kampung Dagang.**

Kelurahan Kampung Dagang adalah satu yang dahulunya sebelum menjadi Kelurahan merupakan sebuah kepenghuluan kampung Dagang. Kampung Dagang sudah terbentuk sejak pada jaman kerajaan Indragiri berdiri, dan kepenghuluan Kampung Dagang berubah menjadi Kelurahan Kampung Dagang pada tahun 1982 sesuai dengan UU No 05 tahun 1979 tentang Pemerintah Desa dan Kelurahan.

Pada waktu itu, Kelurahan Kampung Dagang dipimpin oleh seorang Kepala Kelurahan/Lurah yang bernama bapak AHMAD pada tahun 1982. Adapun urutan kepala Kelurahan Kampung Dagang dari Lurah pertama hingga sekarang adalah sebagai berikut :

Kelurahan Kampung Dagang terletak dalam wilayah Kecamatan Rengat yang berbatasan dengan:

- Sebelah utara berbatasa dengan Kabuapten Pelalawan
- Sebelah selatan berbatasan dengan desa Talang Jerinjing
- Sebelah barat berbatasan denan Desa Kuantan Babu
- Sebelah timur berbatasan dengan Desa Kampung Pulau dan Kelurahan Kampung Besar Kota.

Kelurahan Kampung Dagang mempunyai luas wilayah 86 Km<sup>2</sup> yang terdiri dari 2 lingkungan yaitu: Iklim di Kelurahan Kampung Dagang



sebagaimana di desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan pertanian yang ada di Kelurahan kampung Dagang.

## B. Keadan Sosial

Berikut akan dipaparkan data Jumlah Penduduk Kelurahan Kampung Dagang Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu, seperti dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.1 : Jumlah Penduduk Kelurahan Kampung Dagang Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu.

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)
1	Laki-laki	2.121
2	Perempuan	2.213
Jumlah		4.334

Sumber : Kantor Kelurahan Kampung Dagang, Kec. Rengat, 2012.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat jumlah penduduk Kelurahan Kampung Dagang Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu, dengan jumlah penduduk 4.334 jiwa yang terdiri dari laki-laki berjumlah 2.121 orang, dan perempuan berjumlah 2.213 orang yang terbagi dalam 2 lingkungan.

Berikut akan dipaparkan data Tingkat Pendidikan Penduduk di Kelurahan Kampung Dagang Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu, seperti dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.2 : Tingkat Pendidikan Penduduk di Kelurahan Kampung Dagang Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu.

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	Pra Sekolah	320
2	SD	256
3	SLTP	516
4	SLTA	1.002
5	Sarjana	3.015

Sumber : Kantor Kelurahan Kampung Dagang, Kec. Rengat, 2012.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat tingkat pendidikan masyarakat di Kelurahan Kampung Dagang sebagai berikut Pra Sekolah 320 Orang SD 256 Orang SLTP 516 Orang SLTA 1.002 Orang SARJANA 3.015 Orang.

Berikut akan dipaparkan data bidang pekerjaan Penduduk di Kelurahan Kampung Dagang Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu, seperti dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.3 : Bidang Pekerjaan Penduduk di Kelurahan Kampung Dagang Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu.

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	Petani	106
2	Pedagang	48
3	Pegawai Negeri Sipil	291
4	TNI/Polri	40
5	Swasta	1.219
6	Lain-Lain	200

Sumber : Kantor Kelurahan Kampung Dagang, Kec. Rengat, 2012.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bidang pekerjaan penduduk di Kelurahan Kampung Dagang merupakan daerah pertanian maka sebagian besar penduduk bermata pencarian petani. Pekerjaan Petani 106 Orang, Pedagang 48 Orang, PNS 1.219 Orang, TNI/Polri 291 Orang, Swasta 40 Orang, Lain-lain 200 Orang.

Berikut akan dipaparkan data sarana dan prasarana di Kelurahan Kampung Dagang Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu, seperti dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.4 : Sarana dan Prasarana di Kelurahan Kampung Dagang Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu.

No.	Sarana/Prasarana	Jumlah/Volume	Keterangan
1	Kantor Kelurahan		
2	Puskesmas		
3	Mesjid		
4	Mushola		
5	PAUD		
6	SD Negeri		
7	SMP Negeri		
8	MDA Terpadu		
9	SMU/SMK		
10	Sungai		
11	Sumur Bor		

Sumber : Kantor Kelurahan Kampung Dagang, Kec. Rengat, 2012.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat Sarana Dan Prasarana di Kelurahan Kampung Dagang Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu. Kantor Kelurahan 1 Unit kondisi Layak Pakai, Puskesmas 1 Unit, Layak Pakai Mesjid 3 Unit Layak Pakai, Mushola 3 Unit satu rusak ringan. PAUD 1 Unit, SD Negri 3 Unit, SMP Negeri 1 Unit, MDA Terpadu 3 Unit, SMU/SMK 2 Unit, Sungai 9000 Sumur Bor Tidak Terdata. Pembagian Wilayah Kelurahan Kampung Dagang dibagi menjadi 2 lingkungan dan 13 RT.

### C. Potensi Kelurahan Kampung Dagang

Berdasarkan musyawarah dan penjangkaran yang dilakukan disetiap lingkungan dikelurahan Kampung Dagang, didapati Potensi Kelurahan seperti yang tertera dalam tabel berikut:

Tabel 4.5 : Potensi Kelurahan Kampung Dagang Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu.

No. 1	Bidang 2	Potensi 3	Lokasi 4
	Pendidikan	Adanya Gedung SD	RT 08,RT07 RT 02
		Adanya Gedung SLTP	RT 05
		Adanya Gedung SLTA	RT 08
		Adanya Gedung SMK	RT 08
		Adanya guru TK, SD, MDA, SLTP, SMU, SMK	Kelurahan
		Adanya siswa dan calon siswa untuk TK, SD, SLTP, SLTA.	Kelurahan
	Kesehatan	Adanya Puskesmas Pembantu	Lingkungan
		Adanya Sumur Bor	Kelurahan
		Adanya bidan Kelurahan dan dukun beranak	Kelurahan
		Adanya gedung posyandu	Kelurahan
		Adanya Dokter Gigi	RT 12
	Sarana Prasarana	Adanya jalan umum skal provinsi	Kelurahan
		Adanya jalan kelurahan penghubung antar dusun	Kelurahan
		Adanya jalan gang, penghubung antar rumah (lingkungan)	Kelurahan
		Adanya jalan usaha tani	RT 07
		Adanya Kantor Kelurahan	RT 12
		Adanya Irigasi sawah	RT 07, RT 12
		Adanya Balai Latihan Kerja	RT 05
		Adanya Perkantoran Swasta	Kelurahan
		Adanya Perkantoran Pemerintahan	Kelurahan
		Adanya Tempat Pengisian Bahan Bakar Bensin dan Solar.	RT 08
	Sosial Budaya	Adanya Musholla	Kelurahan
		Adanya Pos Ronda (Siskamling)	Kelurahan
		Adanya Lapangan Bola Voli	Kelurahan
		Adanya Mesjid	Kelurahan
		Adanya Group Reban Perempuan	Kelurahan
		Adanya Majelis taklim Kelurahan (laki-laki/perempuan)	Kelurahan
		Adanya club bola kaki, bulu tangkis, bola voly, tenis meja	Kelurahan
		Adanya kegiatan ibu PKK	Kelurahan

1	2	3	4
	Koperasi dan Usaha Masyarakat Kesehatan	Adanya Bengkel Motor	Kelurahan
		Adanya Bengkel Mobil	Kelurahan
		Adanya Bengkel Las	Kelurahan
		Adanya Usha Pencucian Kendaraan	Kelurahan
		Adanya Pangkalan Minyak Tanah	Kelurahan
		Adanya Warung Sembako	Kelurahan
		Adanya Usaha Masyarakat berupa menjahit	Kelurahan
		Adanya Usaha <i>Moubel</i>	Kelurahan
		Adanya masyarakat yang memelihara hewan ternak berupa sapi, kambing, ayam kampung	Kelurahan
		Adanya Usha Air Isi Ulang	Kelurahan
	Pemerintah	Struktur aparatur Kelurahan Lengkap	Kantor Lurah
		Struktur LPM Lengkap	Kantor Lurah
		Sarana Kantor Kelurahan berupa perlengkapan meja kursi, lemari, computer	Kantor Lurah
		Adanya kendaraan dinas roda dua	Kantor Lurah

Sumber : Kantor Kelurahan Kampung Dagang, Kec. Rengat, 2012.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat musyawarah dan penjangrian yang dilakukan disetiap lingkungan di Kelurahan Kampung Dagang Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu, didapat potensi kelurahan yaitu Bidang Pendidikan: adanya gedung SD di RT 08, Rt 07, RT 02. adanya Gedung SLTP RT 05, adanya Gedung SLTA RT 08, adanya Gedung SMK RT 08, adanya guru TK, SD, MDA, SLTP, SMU, SMK di Kelurahan. Adanya siswa dan calon siswa untuk TK, SD, SLTP, SLTA. Kesehatan : Adanya Puskesmas pembantu Lingkungan Adanya Sumur Bor Kelurahan Adanya bidan Kelurahan dan dukun beranak Kelurahan Adanya Gedung Posyandu Kelurahan Adanya Dokter Gigi RT 12. Sarana Dan Prasarana: Adanya jalan umum skala provinsi di Kelurahan. Adanya jalan Kelurahan penghubung antar dusun Kelurahan

adanya jalan gang, penghubung antar rumah ( lingkungan ) Kelurahan adanya jalan usaha tani RT 07. Adanya Kantor kelurahan RT 12 Adanya Irigasi sawah RT 07,RT 12. Adanya Balai latihan kerja RT 05,adanya Perkantoran Swasta Kelurahan, adanya kantor Pemerintah kelurahan.adanya Tepat pengisian bahan Bakar Bensin dan Solar RT 08. Sosial Budaya: Adanya Mushola di Kelurahan,adanya Pos Ronda (Siskamling) di Kelurahan, adanya Lapangan Bola Voli Kelurahan adanya Mesjid di Kelurahan,adanya grup Rebana perempuan di Kelurahan. Adanya majelis taklim kelurahan (laki-laki/perempuan) di Kelurahan,adanya klub bola kaki, bulu tangkis, bola voli, dan tenis meja Kelurahan Adanya kegiatan ibu PKK di Kelurahan. Koperasi Dan Usaha Masyarakat: Adanya bengkel motor di Kelurahan,adanya bengkel mobil Kelurahan,adanya bengkel las di Kelurahan,adanya Usaha pencucian Kendaraan Kelurahan,adanya pangkalan minyak tanah di Kelurahan,adanya warung sembako Kelurahan,adanya Usaha masyarakat berupa menjahit di Kelurahan,adanya usaha moubel di kelurahan,adanya masyarakat yang memelihara hewan ternak berupa sapi,kambing ayam kampung di Kelurahan. Adanya Usaha Air Isi Ulang Kelurahan.

Pemerintah:Struktur aparatur kelurahan lengkap Kantor Lurah Struktur LPM lengkap di Kantor lurah, sarana kantor kelurahan berupa perlengkapan meja, kursi, lemari, computer di Kantor lurah. Adanya kendaraan dinas roda dua di Kantor lurah.

## **BAB V**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Untuk menyajikan hasil kuesioner yang didapat dari penelitian yang dilakukan, maka penulis sebelumnya perlu untuk memaparkan cara dan pelaksanaan pengambilan data dengan kuesioner sebagaimana hal berikut. Bahwa kuesioner berfungsi guna mengambil data yang dapat memperlihatkan penggambaran terhadap kepemimpinan Lurah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Kampung Dagang Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, yaitu :

1. Memberikan motivasi kepada masyarakat, yaitu untuk mendapatkan hasil yang baik dan optimal.
2. Tanggung jawab sebagai seorang pemimpin terhadap setiap keputusan yang diambil.
3. Keaktifan pemimpin dalam mendorong berpartisipasi dan memberi perhatian timbal balik dengan masyarakat.
4. Komunikasi, yaitu terdiri dari memberikan informasi, stabilisator, fasilitator.

Dalam melakukan penelitian dengan cara kuesioner tersebut, amak dilakukan penghitungan hasil penelitian (*tally*) hasil yang diperoleh dapat disajikan dan diinformasikan data tersebut dengan tabel sebagai berikut :

## 1. Kebijakan Lurah dalam pembayaran PBB

Tabel 5.1 : Kebijakan Lurah dalam mensosialisasikan PBB di Kelurahan Kampung Dagang Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu.

No.	Tanggapan	Jumlah	Persentase
1	Selalu	15	16%
2	Jarang	25	27%
3	Sangat Jarang	33	35%
4	Pernah	12	13%
5	Tidak Pernah	9	10%
Jumlah		94	100%

Sumber : Data Olahan 2012.

Berdasarkan tabel 5.1 di atas, dapat diketahui bahwa Kebijakan Lurah dalam mensosialisasikan PBB di Kelurahan Kampung Dagang Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu. 33 responden (35%) yang menyatakan Lurah sangat jarang memberikan Kebijakan dalam mensosialisasikan PBB. 25 responden (27%) yang menyatakan Lurah jarang memberikan Kebijakan dalam mensosialisasikan PBB. 15 responden (16%) yang menyatakan Lurah selalu memberikan Kebijakan dalam mensosialisasikan PBB. 12 responden (13%) yang menyatakan Lurah pernah memberikan Kebijakan dalam mensosialisasikan PBB. 9 responden (10%) yang menyatakan Lurah tidak pernah memberikan Kebijakan dalam mensosialisasikan PBB.

Berdasarkan hasil kuesioner, masyarakat yang memberikan tanggapan terhadap Kebijakan Lurah dalam mensosialisasikan PBB di Kelurahan Kampung Dagang Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu, sangat jarang karena keterbatasan waktu Lurah tersebut. Dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Lurah dalam mensosialisasikan PBB di



Kelurahan Kampung Dagang Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu, sangat jarang dilakukan.

## 2. Pertanggung jawaban oleh Lurah

Tabel 5.2 : Pertanggung jawaban oleh Lurah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat membayar PBB di Kelurahan Kampung Dagang Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu.

No.	Tanggapan	Jumlah	Persentase
1	Selalu	14	15%
2	Jarang	32	34%
3	Sangat Jarang	26	28%
4	Pernah	12	13%
5	Tidak Pernah	10	11%
	Jumlah	94	100%

Sumber : Data Olahan 2012.

Berdasarkan tabel 5.2 di atas, dapat diketahui bahwa 32 responden (34%) yang menyatakan Lurah jarang mempertanggungjawabkan setiap keputusan/kebijakan yang dibuatnya, 26 responden (28%) yang menyatakan Lurah sangat jarang mempertanggungjawabkan setiap keputusan/kebijakan yang dibuatnya, 14 responden (15%) yang menyatakan Lurah selalu mempertanggungjawabkan setiap keputusan/kebijakan yang dibuatnya, 12 responden (13%) yang menyatakan Lurah pernah mempertanggungjawabkan setiap keputusan/kebijakan yang dibuatnya, 10 responden (11%) yang menyatakan Lurah tidak pernah mempertanggungjawabkan setiap keputusan/kebijakan yang dibuatnya.

Berdasarkan hasil kuesioner, masyarakat yang memberikan tanggapan terhadap Lurah jarang mempertanggungjawabkan setiap keputusan/kebijakan yang dibuatnya, tidak selalu tetapi jarang karena

Lurah kurang memperhatikan pelaksanaan tugasnya. Dapat disimpulkan bahwa setiap keputusan/kebijakan yang dibuat oleh Lurah masih belum maksimal dipertanggungjawabkan hanya sebagian keputusan kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan.

### 3. Realisasi Keputusan yang di buat oleh Lurah

Tabel 5.3 : Realisasi keputusan yang dibuat oleh Lurah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat membayar PBB di Kelurahan Kampung Dagang Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu.

No.	Tanggapan	Jumlah	Persentase
1	Selalu	11	12%
2	Jarang	37	39%
3	Sangat Jarang	24	26%
4	Pernah	12	13%
5	Tidak Pernah	10	11%
Jumlah		94	100%

Sumber : Data Olahan 2012.

Berdasarkan tabel 5.3 di atas, dapat diketahui bahwa 37 responden (39%) yang menyatakan Lurah jarang merealisasikan setiap keputusan/kebijakan yang dibuatnya, 24 responden (26%) yang menyatakan Lurah sangat jarang merealisasikan setiap keputusan/kebijakan yang dibuatnya, 12 responden (13%) yang menyatakan Lurah pernah merealisasikan setiap keputusan/kebijakan yang dibuatnya, 11 responden (12%) yang menyatakan Lurah selalu merealisasikan setiap keputusan/kebijakan yang dibuatnya, 10 responden (11%) yang menyatakan Lurah tidak pernah merealisasikan setiap keputusan/kebijakan yang dibuatnya.

Berdasarkan hasil kuesioner, masyarakat yang memberikan tanggapan terhadap Lurah jarang merealisasikan setiap

keputusan/kebijakan yang dibuatnya, tidak selalu tetapi jarang karena Lurah kurang kemampuannya dalam hal memimpin. Dapat disimpulkan bahwa setiap keputusan/kebijakan yang dibuat oleh Lurah masih belum maksimal terealisasi, hanya sebagian keputusan kebijakan yang telah terealisasi.

#### 4. Keaktifan Lurah

Tabel 5.4 : Keaktifan Lurah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat membayar PBB di Kelurahan Kampung Dagang Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu.

No.	Tanggapan	Jumlah	Persentase
1	Selalu	10	11%
2	Jarang	36	38%
3	Sangat Jarang	25	27%
4	Pernah	13	14%
5	Tidak Pernah	10	11%
	Jumlah	94	100%

Sumber : Data Olahan 2012.

Berdasarkan tabel 5.4 di atas, dapat diketahui bahwa 36 responden (38%) yang menyatakan Lurah jarang aktif mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam membayar pajak, 25 responden (27%) yang menyatakan Lurah sangat jarang aktif mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam membayar pajak, 13 responden (14%) yang menyatakan Lurah pernah aktif mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam membayar pajak, 10 responden (11%) yang menyatakan Lurah selalu dan tidak pernah aktif mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam membayar pajak.

Berdasarkan hasil kuesioner, masyarakat yang memberikan tanggapan terhadap Lurah jarang aktif mengajak masyarakat untuk

berpartisipasi dalam membayar pajak, tidak selalu tetapi jarang karena Lurah kurang waktu yang tepat. Dapat disimpulkan bahwa Lurah jarang aktif mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam membayar pajak.

## 5. Sistem komunikasi Lurah

Tabel 5.5 : Sistem komunikasi Lurah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat membayar PBB di Kelurahan Kampung Dagang Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu.

No.	Tanggapan	Jumlah	Persentase
1	Sangat Baik	9	10%
2	Baik	39	41%
3	Cukup Baik	23	24%
4	Kurang Baik	15	16%
5	Tidak Baik	8	9%
Jumlah		94	100%

Sumber : Data Olahan 2012.

Berdasarkan tabel 5.5 di atas, dapat diketahui bahwa 39 responden (41%) yang menyatakan sistem komunikasi Lurah dalam memberikan informasi kepada masyarakat dalam hal pembayaran PBB sudah baik, 23 responden (24%) yang menyatakan sistem komunikasi Lurah dalam memberikan informasi kepada masyarakat dalam hal pembayaran PBB cukup baik, 15 responden (16%) yang menyatakan sistem komunikasi Lurah dalam memberikan informasi kepada masyarakat dalam hal pembayaran PBB kurang baik, 9 responden (10%) yang menyatakan sistem komunikasi Lurah dalam memberikan informasi kepada masyarakat dalam hal pembayaran PBB sangat baik, 8 responden (9%) yang menyatakan sistem komunikasi Lurah dalam memberikan informasi kepada masyarakat dalam hal pembayaran PBB tidak baik.

Berdasarkan hasil kuesioner, masyarakat yang memberikan tanggapan terhadap sistem komunikasi Lurah dalam memberikan informasi kepada masyarakat dalam hal pembayaran PBB sudah baik, tidak sangat baik, tetapi karena Lurah kurang pengetahuan yang tepat. Dapat disimpulkan bahwa sistem komunikasi Lurah dalam memberikan informasi kepada masyarakat dalam hal pembayaran PBB sudah baik.

#### 6. Sistem komunikasi Lurah sebagai stabilitator

Tabel 5.6 : Sistem komunikasi Lurah sebagai stabilitator dalam meningkatkan partisipasi masyarakat membayar PBB di Kelurahan Kampung Dagang Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu.

No.	Tanggapan	Jumlah	Persentase
1	Sangat Baik	8	9%
2	Baik	37	39%
3	Cukup Baik	26	28%
4	Kurang Baik	13	14%
5	Tidak Baik	10	11%
Jumlah		94	100%

Sumber : Data Olahan 2012.

Berdasarkan tabel 5.6 di atas, dapat diketahui bahwa 37 responden (39%) yang menyatakan Sistem komunikasi Lurah sebagai stabilitator (unsur penengah antara masyarakat dengan pemerintah) terlaksana dengan baik, 26 responden (28%) yang menyatakan Sistem komunikasi Lurah sebagai stabilitator (unsur penengah antara masyarakat dengan pemerintah) terlaksana dengan cukup baik, 13 responden (14%) yang menyatakan Sistem komunikasi Lurah sebagai stabilitator (unsur penengah antara masyarakat dengan pemerintah) terlaksana dengan kurang baik, 10 responden (11%) yang menyatakan Sistem komunikasi Lurah sebagai stabilitator (unsur penengah antara masyarakat dengan pemerintah)

terlaksana dengan tidak baik, 8 responden (9%) yang menyatakan Sistem komunikasi Lurah sebagai stabilitator (unsur penengah antara masyarakat dengan pemerintah) terlaksana dengan sangat baik.

Berdasarkan hasil kuesioner, masyarakat yang memberikan tanggapan terhadap Sistem komunikasi Lurah sebagai stabilitator (unsur penengah antara masyarakat dengan pemerintah) terlaksana dengan baik, tapi tidak sangat baik, tetapi karena Lurah kurang pengalaman sesuai bidangnya. Dapat disimpulkan bahwa yang menyatakan Sistem komunikasi Lurah sebagai stabilitator (unsur penengah antara masyarakat dengan pemerintah) terlaksana dengan baik.

## 7. Sistem komunikasi Lurah sebagai fasilitator

Tabel 5.7 : Sistem komunikasi Lurah sebagai fasilitator dalam meningkatkan partisipasi masyarakat membayar PBB di Kelurahan Kampung Dagang Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu.

No.	Tanggapan	Jumlah	Persentase
1	Sangat Baik	17	18%
2	Baik	30	32%
3	Cukup Baik	22	23%
4	Kurang Baik	14	15%
5	Tidak Baik	11	12%
Jumlah		94	100%

Sumber : Data Olahan 2012.

Berdasarkan tabel 5.7 di atas, dapat diketahui bahwa 30 responden (32%) yang menyatakan Sistem komunikasi Lurah sebagai fasilitator (mempermudah, memperlancar kegiatan masyarakat) terlaksana dengan baik, 22 responden (23%) yang menyatakan Sistem komunikasi Lurah sebagai fasilitator (mempermudah, memperlancar kegiatan masyarakat) terlaksana dengan cukup baik, 17 responden (18%) yang menyatakan

Sistem komunikasi Lurah sebagai fasilitator (mempermudah, memperlancar kegiatan masyarakat) terlaksana dengan sangat baik, 14 responden (15%) yang menyatakan Sistem komunikasi Lurah sebagai fasilitator (mempermudah, memperlancar kegiatan masyarakat) terlaksana dengan kurang baik, 11 responden (32%) yang menyatakan Sistem komunikasi Lurah sebagai fasilitator (mempermudah, memperlancar kegiatan masyarakat) terlaksana dengan tidak baik.

Berdasarkan hasil kuesioner, masyarakat yang memberikan tanggapan terhadap Sistem komunikasi Lurah sebagai fasilitator (mempermudah, memperlancar kegiatan masyarakat) terlaksana dengan baik, tetapi karena Lurah kurang mampu memanfaatkan sumber daya yang ada. Dapat disimpulkan bahwa yang menyatakan 30 responden (32%) yang menyatakan Sistem komunikasi Lurah sebagai fasilitator (mempermudah, memperlancar kegiatan masyarakat) terlaksana dengan baik.





## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1. Kesimpulan**

1. Motivasi Lurah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat membayar PBB di Kelurahan Kampung Dagang Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu, tidak jarang, tetapi sangat jarang karena keterbatasan waktu Lurah tersebut. Pemberian motivasi kepada masyarakat dalam meningkatkan pembayaran PBB yang dilakukan oleh Lurah, sangat jarang dilakukan. Hal ini sesuai dengan tabel 5.1 hasil penelitian tanggapan responden yang menyatakan sangat jarang berjumlah 33 orang atau 35%.
2. Lurah jarang mempertanggungjawabkan setiap keputusan/kebijakan yang dibuatnya, tidak selalu tetapi jarang karena Lurah kurang memperhatikan pelaksanaan tugasnya. Setiap keputusan/kebijakan yang dibuat oleh Lurah masih belum maksimal dipertanggungjawabkan hanya sebagian keputusan kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sesuai dengan tabel 5.2 hasil penelitian tanggapan responden yang menyatakan jarang berjumlah 32 orang atau 34%.
3. Lurah jarang merealisasikan setiap keputusan/kebijakan yang dibuatnya, tidak selalu tetapi jarang karena Lurah kurang kemampuannya dalam hal memimpin. Setiap keputusan/kebijakan yang dibuat oleh Lurah masih belum maksimal terealisasikan, hanya sebagian keputusan kebijakan yang telah terealisasikan. Hal ini sesuai dengan tabel 5.3 hasil penelitian

tanggapan responden yang menyatakan jarang berjumlah 37 orang atau 39%.

4. Lurah jarang aktif mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam membayar pajak, tidak selalu tetapi jarang karena Lurah kurang waktu yang tepat. Hal ini sesuai dengan tabel 5.4 hasil penelitian tanggapan responden yang menyatakan jarang berjumlah 36 orang atau 38%.
5. Sistem komunikasi Lurah dalam memberikan informasi kepada masyarakat dalam hal pembayaran PBB sudah baik, tidak sangat baik, tetapi karena Lurah kurang pengetahuan yang tepat. Sistem komunikasi Lurah dalam memberikan informasi kepada masyarakat dalam hal pembayaran PBB sudah baik. Hal ini sesuai dengan tabel 5.5 hasil penelitian tanggapan responden yang menyatakan baik berjumlah 39 orang atau 41%.
6. Sistem komunikasi Lurah sebagai stabilitator (unsur penengah antara masyarakat dengan pemerintah) terlaksana dengan baik, tapi tidak sangat baik, tetapi karena Lurah kurang pengalaman sesuai bidangnya. Sistem komunikasi Lurah sebagai stabilitator (unsur penengah antara masyarakat dengan pemerintah) terlaksana dengan baik. Hal ini sesuai dengan tabel 5.6 hasil penelitian tanggapan responden yang menyatakan baik berjumlah 37 orang atau 39%.
7. Sistem komunikasi Lurah sebagai fasilitator (mempermudah, memperlancar kegiatan masyarakat) terlaksana dengan baik, tetapi karena Lurah kurang mampu memanfaatkan sumber daya yang ada. Hal

ini sesuai dengan tabel 5.7 hasil penelitian tanggapan responden yang menyatakan jarang berjumlah 30 orang atau 32%.

## **6.2. Saran-saran**

Dengan kesimpulan di atas dan dengan masih adanya permasalahan yang dihadapi, maka dalam kesempatan ini penulis ingin mengajukan beberapa saran yang diataranya :

- a. Lurah perlu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar PBB di Kelurahan Kampung Dagang Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu, sehingga tercapai tujuan yang telah ditetapkan pemerintah, baik pusat, propinsi dan kabupaten Indragiri Hulu.
- b. Perlu adanya pengawasan dan evaluasi terhadap motivasi, system komunikasi Lurah sehingga partisipasi masyarakat dapat lebih ditingkatkan guna mendukung program pemerintah dalam usaha pemerataan pembangunan di segala bidang.
- c. Perlu meningkatkan atau memberi lebih banyak informasi tentang realisasi keputusan yang dibuat oleh Lurah, sehingga dapat memberikan pemahaman terhadap masyarakat wajib pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Manajemen Penelitian*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Faisal, Sanapiah. 1995. *Format-Format Penelitian Sosial: Dasar-dasar dan Aplikasi*, Rajawali Press, Jakarta.
- Hasibuan Malayu SP., 2006. *Organisasi dan Motivasi Dasar Peningkatan Produktifitas*. Bandung: Bina Aksara.
- Herjanto, Eddy, 2007, *Manajemen Operasi edisi ketiga*, PT Grasindo, Jakarta.
- <http://f4ilkom.blogspot.com/2012/05/pengambilan-keputusan-bab-ii-pembahasan.html>.
- <http://icecube.blogstudent.mb.ipb.ac.id/2010/07/13/pengambilan-keputusan>.
- <http://nadya-nandy.blogspot.com/2010/06/membuat-keputusan.html>.
- Josef Riwu Kaho, 2003, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia : Identifikasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah*, Jakarta PT Raja Grafindo Persada
- Luthans, Fred. 2006. *Perilaku Organisasi*. Diterjemahkan oleh Vivin Andika Yuwono dkk. Edisi Pertama, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2009, *Perpajakan*, Edisi Revisi, Andi, Yogyakarta.
- Notoatmodjo. 2009. *Ilmu Kesehatan Masyarakat*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Resmi, Siti, 2009, *Perpajakan Teori dan Kasus*, Salemba Empat, Jakarta.
- Siagian, Sondang P, 2001, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, cetakan Ketujuh, Jakarta: Radar Jaya Offset
- Siagian, S. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Siagian Sondang P., 2006. *Organisasi Kepemimpinan Perilaku Administrasi*. Jakarta.
- Singarimbun dan Effendi. 1989. *Metode Penelitian Survei*. LP3ES. Jakarta.
- Sondang P. Siagian (2005). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Penerbit PT. Bumi Aksara, Jakarta

Sugiyono, 1999. *Metode Penelitian Administrasi*, Edisi Keenam, Penerbit Alfabeta, Bandung.

Terry, George, R, 2005 *Dasar – Dasar Manajemen*, Bumi Aksara Jakarta.

Waluyo, 2011, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Manajemen Penelitian*. Jakarta :RinekaCipta.
- Faisal, Sanapiah. 1995. *Format-Format Penelitian Sosial: Dasar-dasar dan Aplikasi*, Rajawali Press, Jakarta.
- Hasibuan Malayu SP., 2006. *Organisasi dan Motivasi Dasar Peningkatan Produktifitas*. Bandung: Bina Aksara.
- Herjanto, Eddy, 2007, *Manajemen Operasional*, PT Grasindo, Jakarta.
- <http://f4ilkom.blogspot.com/2012/05/pengambilan-keputusan-bab-ii-pembahasan.html>.
- <http://icecube.blogstudent.mb.ipb.ac.id/2010/07/13/pengambilan-keputusan>.
- <http://nadya-nandy.blogspot.com/2010/06/membuat-keputusan.html>.
- Josef Riwo Kaho, 2003, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia : Identifikasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah*, Jakarta PT Raja Grafindo Persada
- Luthans, Fred. 2006. *Perilaku Organisasi*. Diterjemahkan oleh Vivin Andika Yuwonodkk. Edisi Pertama, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2009, *Perpajakan*, Edisi Revisi, Andi, Yogyakarta.
- Notoatmodjo. 2009. *Ilmu Kesehatan Masyarakat*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Resmi, Siti, 2009, *Perpajakan Teori dan Kasus*, Salemba Empat, Jakarta.
- Siagian, Sondang P, 2001, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, cetakan Ketujuh, Jakarta: Radar Jaya Offset
- Siagian, S. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Siagian Sondang P., 2006. *Organisasi Kepemimpinan Perilaku Administrasi*. Jakarta.
- Singarimbun dan Effendi. 1989. *Metode Penelitian Survei*. LP3ES. Jakarta.

Sondang P. Siagian (2005). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Penerbit PT. Bumi Aksara, Jakarta

Sugiyono, 1999. *Metode Penelitian Administrasi*, Edisi Keenam, Penerbit Alfabeta, Bandung.

Terry, George, R, 2005 *Dasar – Dasar Manajemen*, Bumi Aksara Jakarta.

Waluyo, 2011, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta.

